



# 4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi di Semester II 2017



Kepala OPD Provinsi Kalbar dan Anggota DPRD se Kalbar.

Ida menyebutkan klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi terdiri atas empat status yakni status 1 sesuai rekomendasi, status 2 belum sesuai rekomendasi, status 3 belum ditindaklanjuti, status 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Ida menambahkan dalam setiap pertemuan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017.

"Saat ini baru enam entitas yang telah masuk datanya dalam SIPTL; Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Melawi, sanggau, Sambas dan Mempawah," Ida.

Namun demikian, Ida mengakui masih terdapat beberapa kendala. Seperti adanya double input, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektoral.

"Harapan kami inspektoral segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap," pesan Ida. (mase)

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat sudah memberikan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi pada semester II tahun 2017. Jumlah itu bertambah dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDDT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan tanggal 19 Desember 2017.

Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu.

Lalu sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar 15,36 persen. Kemudian sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen. Dan sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41 persen dari total rekomendasi. Jumlah ini meningkat dari semester lalu

## PENYERAHAN : Pj Gubernur Kalimantan Barat Dody Riyadmadji hadir saat penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017

sebanyak lima rekomendasi atau sebesar 14,290 persen. Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Ida Sundari mengatakan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ini mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Keuangan dan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK

2/2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya selama enam puluh hari setelah LHP diterima," kata Ida

saat Penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Selasa (16/1)

Kegiatan itu dihadiri Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Dody Riyadmadji, sejumlah kepala daerah se-Kalbar,

HUMAS PEMPROV